



**SUMBER BERITA**

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
X	RADAR BENGKULU		.....

**KAMIS, 24 JANUARI 2019**

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**Aset Pemprov Rp 3,5 Triliun, Kot Tidak Mampu Diurus?**

**Bangunan Liar Mulai Menjamur**

**RBI, BENGKULU** - Bukan hanya bangunan di kawasan Lapang Golf yang dijadikan bangunan ilegal, namun di kawasan Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu pun diketahui saat ini mulai digarap warga. Lahan tersebut merupakan aset milik Pemda Provinsi Bengkulu. Namun sayangnya tampak dibiarkan digarap oknum tertentu. Jumlah aset Pemda Provinsi Bengkulu saat ini berkisar Rp 4,7 triliun.

Dalam temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, milik Pemerintah Provinsi

(Pemprov) Bengkulu, yang tidak terdata secara baik sebesar Rp 3,5 triliun.

Gubernur Bengkulu Dr H Rohidin Mersyah beberapa waktu lalu dalam rapat bersama jajaran OPD pun menyampaikan agar membentuk tim untuk melakukan inventarisir aset tersebut. Pasalnya masih banyak lahan aset Pemprov Bengkulu yang digarap oleh warga. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu, Heru Susanto melalui Kepala Bidang Aset Sahrul Azhari

menanggapi perihal ini, tidak memungkiri aset Daerah Provinsi Bengkulu masih banyak digarap warga. "Ya, memang masih ada banyak. Kalau soal penertiban silakan satpol pp melakukan karena itu sesuai Perda penegakan hukum," terangnya. Menurut Sahrul, aset ini dibebaskan sejak tahun 1989 dengan dibayar memakai uang negara. Seperti penertiban bangunan liar di kawasan Lapangan Golf ini akan berkordinasi dengan pihak BKSDA (Balai Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam),

dikarenakan masih status kawasan Taman Wisata Alam. Pemerintah merasa dirugikan akibat perihal tersebut, jika tidak cepat ditertibkan dengan waktu cepat atau lamban lahan tersebut digarap oleh oknum tertentu. "Ya, pasti karena itu ada aturan yang berlaku. Namun ini pembebasan lahan ini dibayar dengan uang negara. Maka nya kita membentuk tim melibatkan maupun jajaran diluar OPD, yang terikat dalam pengawasan aset ini," pungkasnya kemarin Rabu (23/1). (Bro)